

BAB I

PENDAHULUAN

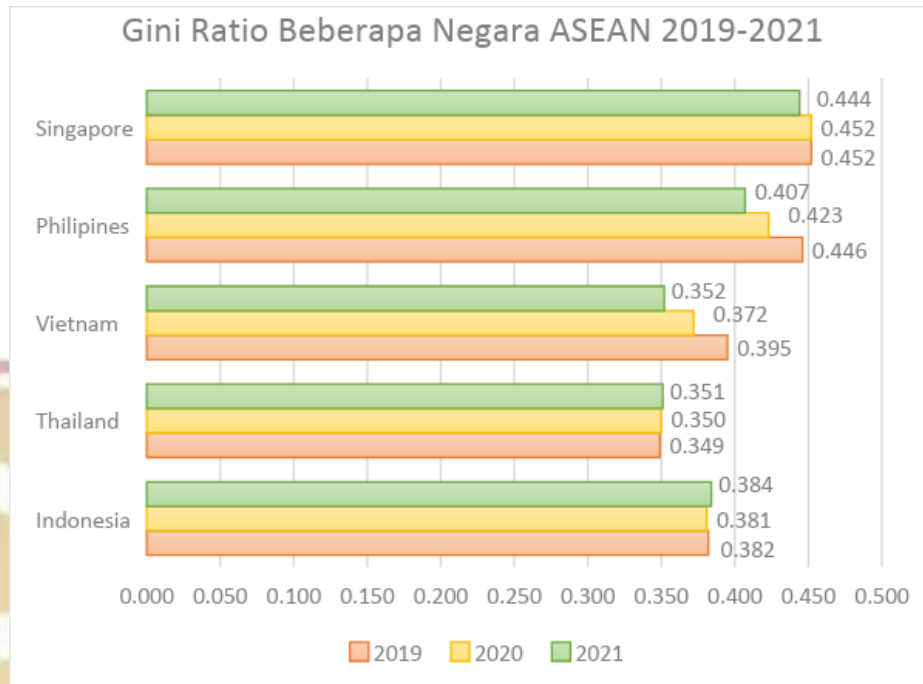
1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan sedang mengalami peralihan dari status negara berkembang menuju negara maju. Untuk mencapai status negara maju tersebut, Indonesia perlu melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menjadi landasan utama bagi Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan prinsip pemenuhan kebutuhan tanpa mengorbankan sumber daya yang ada di masa mendatang. Salah satu aspek penting dalam mencapai SDGs adalah mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat (*United Nations*, 2020).

Ketimpangan Pendapatan merupakan salah satu masalah ekonomi yang sangat fundamental dan menjadi fokus perhatian di hampir setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masih tinggi, karena sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Upaya telah dilakukan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan, salah satunya melalui pembangunan ekonomi (Lewis, 2004). Namun, meskipun upaya ini dapat mengurangi tingkat ketimpangan, namun tidak dapat menghilangkannya sepenuhnya, karena ketimpangan tetap akan ada dalam sistem sosial tertentu. Ketimpangan Pendapatan adalah hal yang alami dan ada di negara berkembang maupun maju, perbedaannya hanya terletak pada seberapa besar atau kecil tingkat ketimpangan dan tingkat kesulitan dalam mengatasinya. Ketimpangan yang terjadi adalah konsekuensi dari proses pembangunan yang melibatkan perubahan dalam proses tersebut (Wibowo, 2016).

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan mengurangi ketimpangan secara signifikan. Ketimpangan pendapatan antar wilayah menjadi fenomena ekonomi yang penting untuk dipelajari dan dianalisis, karena hal ini akan menentukan kebijakan dan langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan efektif dan efisien, meskipun dalam keterbatasan anggaran dan sumber daya. Ketimpangan timbul akibat ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar wilayah, sehingga ada perbedaan antara wilayah maju dan wilayah terbelakang. Ketimpangan ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah mendorong wilayah yang kurang maju untuk berkompetisi dan meningkatkan pertumbuhannya, sehingga kesejahteraan dapat meningkat. Namun, dampak negatifnya adalah ketimpangan dapat menyebabkan ketidakefisienan ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketidakadilan karena kesenjangan yang besar (Todaro & Michael, 2006).

Fakta yang ditemukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (2020) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan miskin di seluruh dunia terus meningkat beberapa dekade terakhir (Hodula, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat memiliki dampak negatif terhadap proses pembangunan suatu negara. Laporan dari *Asian Development Bank* (2019) juga mengindikasikan bahwa tingginya ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan konflik sosial, mogok kerja, peningkatan kriminalitas, dan kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara berkembang untuk mengatasi ketimpangan pendapatan guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.



Gambar 1.1 Grafik Gini Ratio Beberapa Negara ASEAN 2019-2021

Sumber: World Bank Data, 2019-2021

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh *World Bank* terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia, mengalami perubahan dari tahun 2019 hingga 2021. Meskipun Indonesia mengalami peningkatan dalam tingkat ketimpangan pendapatan setiap tahun, negara-negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Philipines justru mengalami penurunan. Sedangkan Singapore tetap memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi dan stabil selama periode tersebut.

Menariknya, meskipun Singapura dan Filipina memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, keduanya secara konsisten menunjukkan penurunan setiap periode. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara telah berhasil mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam mengurangi ketimpangan tersebut. Namun, situasi di Indonesia berbeda karena negara ini mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan secara konsisten. Hal ini tercermin dari peningkatan yang signifikan pada rasio Gini, yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia (BPS, 2022).



Gambar 1.2 Grafik Rasio Gini Indonesia 2019-2022

Sumber: BPS (2022)

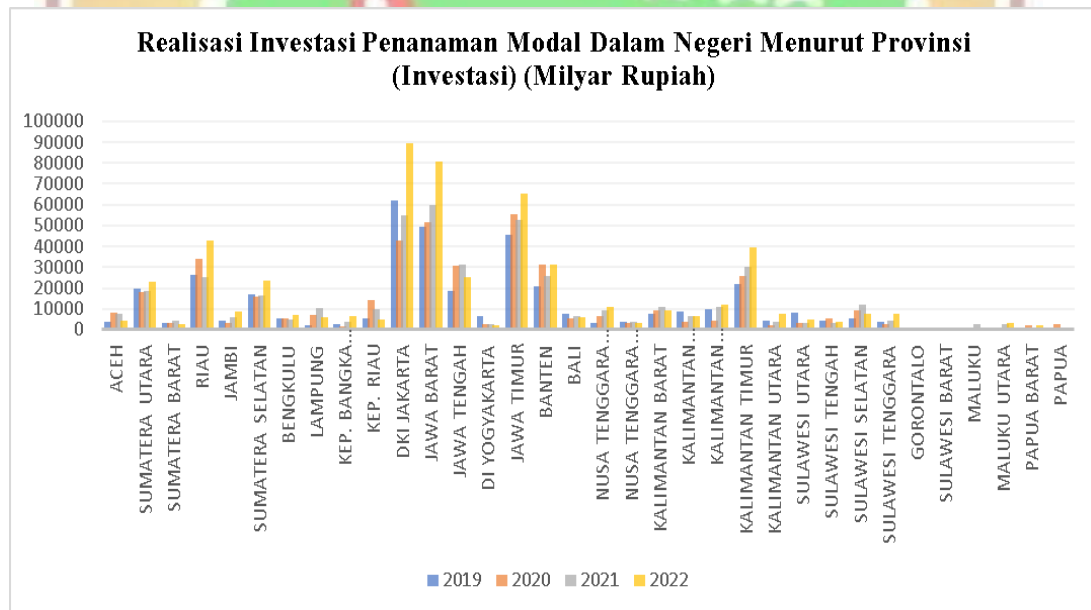
Rasio Gini Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020, mencapai 0,385. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun berikutnya menjadi 0,384, angka tersebut tetap menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi di negara ini. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menekan ketimpangan pendapatan di Indonesia belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, pemerintah dan para pengambil kebijakan telah berupaya mencari solusi untuk mengurangi ketimpangan tersebut (Hodula, 2023).

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan adalah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, berarti semakin baik juga tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang kuat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, Van Niekerk (2020) menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi saja tidak selalu mampu mengatasi ketimpangan pendapatan dengan signifikan, terutama di Negara Sedang Berkembang (NSB).

Oleh karena itu, selain pertumbuhan ekonomi, faktor lain yang memiliki pengaruh penting terhadap ketimpangan pendapatan adalah investasi. Investasi

menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi karena memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Ketika pemerintah mendorong peningkatan investasi di berbagai daerah, ini dapat menciptakan peluang dan kesempatan bagi wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang berkembang untuk tumbuh dan berkembang.

Investasi yang masuk ke daerah yang kurang maju akan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi di sana. Hal ini menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan meningkatkan pendapatan mereka. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, kesenjangan pendapatan antar wilayah dapat berkurang. Investasi juga berperan penting dalam membangun infrastruktur dan sumber daya manusia, yang merupakan pondasi penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif (Sugiarto, 2019).



Gambar 1.3 Grafik Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi (Investasi) 2019-2022

Sumber: BPS (2022)

Namun, berdasarkan data realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dari tahun 2019 hingga 2022, terlihat bahwa wilayah Indonesia bagian timur mengalami kekurangan investasi yang signifikan dibandingkan dengan beberapa provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat. DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki tingkat investasi yang jauh lebih tinggi, terutama DKI Jakarta

yang mencatatkan angka investasi yang mencapai puluhan ribu milyar Rupiah pada tahun 2022. Sementara itu, provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur mengalami kekurangan investasi dengan angka investasi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Pulau Jawa.

Kondisi ini dapat menyebabkan kesulitan bagi provinsi-provinsi dengan investasi rendah dalam mengembangkan sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, wilayah-wilayah dengan tingkat investasi tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, bagi daerah yang investasinya rendah, akses ke modal melalui kredit dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan investasi dan mengurangi ketimpangan pendapatan (Nainggolan, 2023).

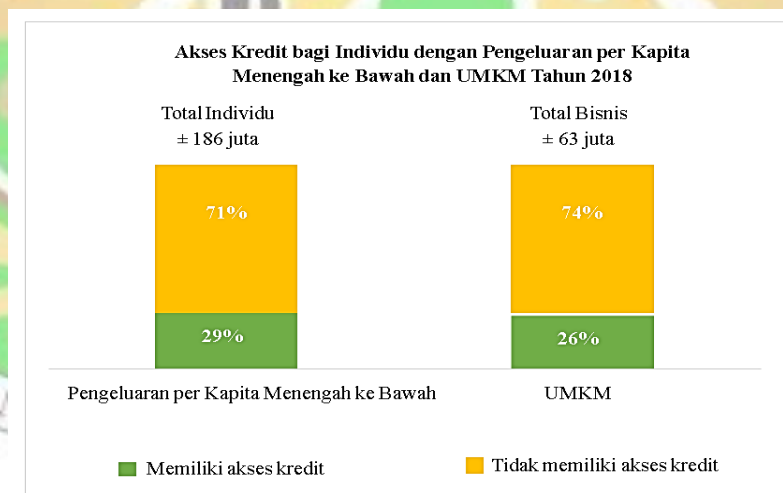
Ketika investasi dari sektor swasta atau investor lain masih rendah di suatu daerah, pemerintah daerah atau perusahaan di wilayah tersebut dapat mencari sumber pendanaan tambahan melalui kredit. Nugroho (2008) menjelaskan bahwa, dengan memanfaatkan kredit, daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dapat menggunakan dana tambahan tersebut untuk berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan yang produktif, atau sektor lain seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Kredit yang diberikan ke UMKM dapat membantu meningkatkan akses keuangan bagi mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah (Ompusunggu et al., 2023).

Sebagai lembaga keuangan utama, perbankan memiliki peran kunci dalam menyediakan dana bagi pelaku usaha, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan, untuk berinvestasi dalam pembangunan ekonomi. Perbankan dapat memberikan kredit yang diperlukan oleh daerah atau pelaku usaha untuk mendorong investasi, membangun infrastruktur, dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial. Melalui sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, termasuk perbankan, diharapkan investasi dapat meningkat, pembangunan

ekonomi berjalan lebih efisien dan efektif, serta kesenjangan antar wilayah dapat berkurang (Novitasari, 2022).

Meskipun telah dilakukan upaya melalui sistem perbankan tradisional, ternyata hasilnya belum memadai dalam mengatasi ketimpangan pendapatan (Bolton et al., 2016; Stiglitz, 2016). Di Indonesia, masih banyak individu dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum terhubung dengan lembaga perbankan. Hal ini mengakibatkan mereka menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses keuangan yang diperlukan untuk mendapatkan kredit dan mengembangkan usaha mereka sehingga dapat meningkatkan pendapatan (Primasari, 2022).

Bank Indonesia mencatat sebanyak 91,3 juta masyarakat dan 62,9 juta pelaku UMKM belum terkoneksi dengan lembaga pembiayaan dan perbankan. Berdasarkan data BPS, kurang lebih terdapat sekitar 186 juta individu usia kerja dari segmen pengeluaran per kapita menengah ke bawah dan 63 juta bisnis yang tergabung dalam segmen UMKM di Indonesia pada tahun 2018. Dari angka tersebut, sekitar 71 % individu berpenghasilan menengah ke bawah dan 74 % bisnis UMKM masih belum memiliki akses terhadap kredit.



Gambar 1.4 Grafik Akses Kredit bagi Individu dengan Pengeluaran per Kapita Menengah ke Bawah dan UMKM Tahun 2018

Sumber: BPS, Kemenkop UKM, dan Bank Indonesia (2018)

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar individu dengan penghasilan menengah ke bawah dan bisnis UMKM masih menghadapi kendala dalam

memperoleh pembiayaan yang mereka butuhkan. Faktanya, kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan cenderung menunjukkan bias sosio ekonomi tertentu, di mana mereka yang sudah memiliki akses ke sumber daya dan keuangan yang cukup cenderung mendapatkan kredit lebih mudah daripada mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih rentan (Bartlett et al., 2019; De Andrés et al., 2020; Fuster et al., 2020).

Oleh karena itu, implementasi sistem keuangan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat menjadi tindakan yang diperlukan dalam program inklusi keuangan. Program inklusi keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal (Rizkianda & Wiguna, 2022). Selain itu, Park & Mercado (2015) juga menunjukkan bahwa inklusi keuangan, yang melibatkan upaya meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan, telah terbukti efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Salah satu instrumen inklusi keuangan yang sedang berkembang adalah FinTech, yang dapat menjadi alternatif pembiayaan inovatif bagi segmen masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga perbankan tradisional. FinTech sendiri telah berkembang pesat di industri keuangan Indonesia sejak tahun 2010 seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur digital, inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan pengguna ponsel dan penetrasi internet. *Start-up* FinTech juga terbukti lebih fleksibel dalam mengadopsi inovasi teknologi karena mereka tidak beroperasi dalam ekosistem keuangan tradisional seperti perbankan (Hornuf dan Haddad, 2018).

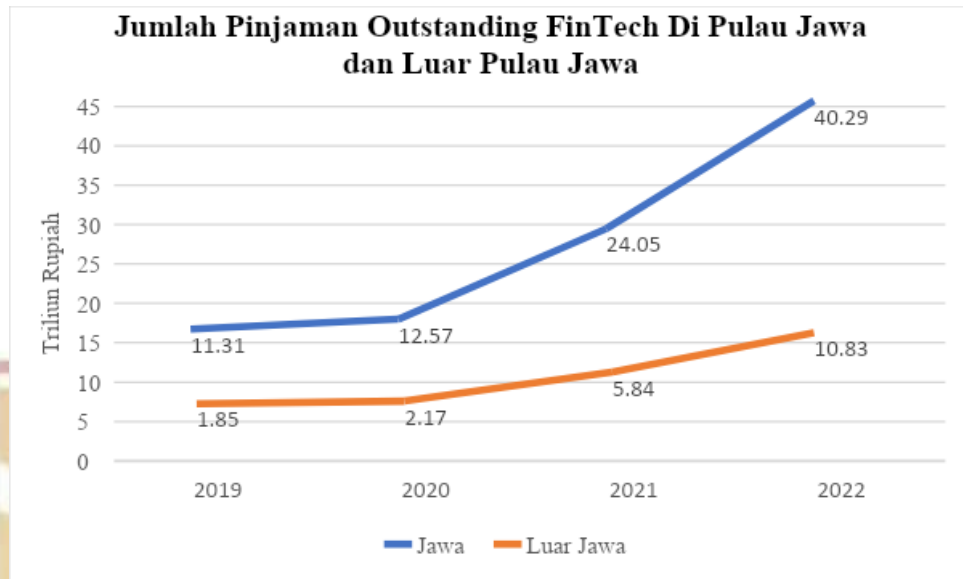
Perkembangan pesat *startup* FinTech di Indonesia telah menghadirkan berbagai produk FinTech yang beragam. Salah satu layanan FinTech yang populer dan dominan di pasar Indonesia adalah *peer-to-peer* (P2P) *lending*. Hingga Desember 2020, tercatat 149 perusahaan FinTech P2P *lending* terdaftar, di mana 37 di antaranya telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjaman FinTech dilakukan secara langsung melalui platform yang disediakan oleh penyelenggara, dengan memanfaatkan *big data* untuk menganalisis riwayat kredit nasabah sebelum memberikan persetujuan pinjaman (Phan dkk., 2019).

Data dari OJK menunjukkan bahwa pada Desember 2020, jumlah pinjaman yang belum dilunasi mencapai Rp15,32 triliun, sementara jumlah rekening pemberi pinjaman dan peminjam terus meningkat setiap tahunnya. Akses pembiayaan yang kurang memadai, terutama bagi individu yang tidak memiliki akses ke cabang bank atau layanan keuangan formal, menciptakan peluang besar bagi pinjaman FinTech untuk meningkatkan akses kredit kepada masyarakat yang belum terlayani secara finansial (Primasari, 2022).

Pinjaman FinTech memiliki potensi yang kuat untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan mengakses wilayah-wilayah yang belum terlayani oleh layanan keuangan formal. Dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana kebijakan pembatasan mobilitas meningkatkan penetrasi internet, pinjaman FinTech menjadi solusi yang penting untuk meningkatkan pendapatan bagi individu maupun UMKM. Pandemi COVID-19 juga tidak menghambat kinerja pinjaman FinTech dalam menyalurkan pinjaman, bahkan membuka peluang baru seiring dengan penurunan kinerja perbankan akibat pandemi (Fu & Mishra, 2020).

Perkembangan pinjaman FinTech tetap positif di tengah pandemi, ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pinjaman outstanding setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan akan pinjaman FinTech terus meningkat dan masyarakat semakin mengandalkan layanan ini dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Dengan memanfaatkan teknologi dan model bisnis yang inovatif, pinjaman FinTech mampu menawarkan proses yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional.

Namun, terdapat fakta menarik berdasarkan data OJK yang mengungkapkan bahwa hampir semua perusahaan Pinjaman FinTech berdomisili di Pulau Jawa, dan penyaluran pinjaman FinTech juga sebagian besar berpusat di wilayah tersebut. Gambar 1.5 menunjukkan bahwa hingga 2022, rata-rata pinjaman outstanding FinTech di Pulau Jawa mencapai sekitar Rp40,29 triliun, sementara di luar Pulau Jawa hanya sekitar Rp10,83 triliun.



Gambar 1.5 Grafik Jumlah Pinjaman Outstanding FinTech Di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa

Sumber: OJK (2019-2022)

Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam penyaluran pinjaman FinTech antara wilayah Jawa dan wilayah di luar Jawa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam penelitian Adiputra (2021) dan Saraswati et al. (2020) bahwa terpusatnya penyaluran pinjaman FinTech dan perusahaan FinTech di pulau Jawa, dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin tinggi. Namun, penelitian Xuan & Trung (2022) dan Jiang & Li (2021) memberikan bukti sebaliknya, yaitu inklusi keuangan, terutama melalui pinjaman FinTech, memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Melalui inovasi inklusi keuangan seperti pinjaman FinTech, akses ke layanan keuangan dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan, sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Akan tetapi, Reis (2021) dan Ashenafi & Dong (2022) menunjukkan bahwa dampak langsung dari pinjaman FinTech terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan mungkin tidak begitu signifikan. Meskipun pinjaman FinTech dapat memberikan kesempatan bagi individu dengan akses terbatas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui layanan keuangan, namun dalam konteks negara berkembang, dampaknya

terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan secara keseluruhan masih terbatas.

Dengan demikian, merupakan hal yang menarik bagi penulis untuk menganalisis pengaruh pinjaman FinTech terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, mengingat pertumbuhan yang pesat dari sektor FinTech, terutama selama pandemi COVID-19. Dalam kondisi di mana digitalisasi telah merasuk ke berbagai aspek kehidupan, individu dan UMKM membutuhkan pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga kelangsungan bisnis mereka. Selain itu, penting untuk diingat bahwa pengaruh FinTech terhadap ketimpangan pendapatan juga dapat tergantung pada bagaimana akses dan penggunaan teknologi ini didistribusikan di masyarakat, apakah semua kalangan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pinjaman FinTech dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan di negara ini.

Selain itu, penulis menemukan bahwa studi yang mengeksplorasi kontribusi pinjaman FinTech terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia masih sangat terbatas. Padahal, potensi FinTech khususnya dalam hal pembiayaan dan inklusi keuangan telah menjadi sorotan dalam upaya mengatasi ketimpangan pendapatan (Oh & Rosenkranz, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji pengaruh pinjaman FinTech terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan data panel tingkat provinsi yang mencakup 34 provinsi di Indonesia. Penggunaan data panel pada tingkat provinsi juga memungkinkan penulis untuk melakukan analisis sub kelompok provinsi dengan membagi sampel berdasarkan pinjaman FinTech di masing-masing provinsi, mengingat sebagian besar penyaluran pinjaman FinTech masih berfokus di Pulau Jawa. Namun, pemilihan periode sampel penelitian didasarkan atas ketersediaan data variabel independen utama yaitu pinjaman *outstanding* FinTech yang tersedia secara lengkap untuk 34 provinsi di Indonesia sejak triwulan I tahun 2019, sehingga penelitian ini belum memungkinkan untuk melakukan analisis jangka panjang.

Pada penelitian ini penulis juga memasukkan variabel kontrol pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini dilakukan untuk mengontrol faktor-faktor endogen yang dapat mempengaruhi baik pinjaman FinTech maupun

ketimpangan pendapatan. Variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka perlu dikontrol karena keduanya memiliki keterkaitan dengan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, namun jika tidak diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja, maka ketimpangan pendapatan dapat semakin membesar. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin besar karena hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki pekerjaan dan pendapatan yang stabil (Hodula, 2023; Jiang, 2021; Pi & Zhang, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena inovasi disruptif pada industri jasa keuangan telah menciptakan perubahan besar dalam landscape industri keuangan, mulai dari struktur industri, teknologi intermediasi, hingga model pemasaran kepada konsumen. Salah satu hasil dari inovasi tersebut adalah lahirnya *Financial Technology* (FinTech) yang menjadi salah satu inovasi disruptif pada industri jasa keuangan (Siregar, 2020). FinTech menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sistem layanan keuangan, memberikan kemudahan akses dan kenyamanan kepada pengguna, serta meminimalkan biaya operasional. Sejak munculnya FinTech, berbagai platform dan layanan FinTech telah menarik minat banyak orang, termasuk individu dengan tingkat pengeluaran per kapita menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Munawar et al., 2022).

Keberadaan FinTech memiliki potensi yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi, FinTech lending menjadi salah satu bentuk FinTech yang menawarkan solusi dalam menyediakan akses keuangan bagi individu dan pelaku UMKM yang sebelumnya sulit terhubung dengan lembaga perbankan tradisional (Bartlett et al., 2018). *Platform FinTech lending* memungkinkan individu dan pelaku UMKM untuk dengan mudah mengajukan pinjaman dengan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan bank konvensional (Menat, 2016). Ini membuka peluang bagi mereka untuk meningkatkan usaha mereka, memperluas skala bisnis, dan mengoptimalkan potensi pendapatan.

Salah satu keunggulan FinTech lending adalah kemampuannya dalam mengurangi informasi asimetri dalam proses pemberian pinjaman. Dengan memanfaatkan *big data* dan teknologi analitik, FinTech *lending* dapat secara efektif menganalisis profil kredit peminjam sehingga risiko kredit dapat diminimalkan. Proses ini memungkinkan para pemberi pinjaman untuk memberikan tingkat bunga yang lebih wajar dan transparan kepada individu dan pelaku UMKM (Odinet dan College, 2018). Dengan akses yang lebih mudah dan terjangkau ke pinjaman, mereka dapat memanfaatkannya untuk melakukan investasi dalam produksi, meningkatkan kualitas produk, atau bahkan melakukan diversifikasi bisnis (Yan dkk., 2015; Song dan Appiah-Otoo, 2022).

Tidak hanya itu, pertumbuhan FinTech *lending* juga berpotensi mendorong kewirausahaan dan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan kemudahan akses keuangan yang ditawarkan oleh FinTech *lending*, individu dan pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap pinjaman dari lembaga keuangan formal, dapat mencari sumber pendanaan yang diperlukan untuk memulai usaha atau mengembangkan bisnis mereka. Ini akan membantu meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi formal dan mengurangi kesenjangan pendapatan di berbagai daerah di Indonesia.

Di sisi lain, FinTech *lending* juga bisa berdampak negatif. Seiring berkembangnya FinTech *lending*, dana berpindah dari ekonomi riil ke platform FinTech, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan simpanan dan likuiditas perbankan. Kondisi tersebut dapat mengurangi modal bank yang berdampak pada penurunan pasokan kredit domestik, mendorong terjadinya krisis keuangan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi melalui penurunan investasi dan produksi (Chen dkk., 2019 dan Li dkk., 2019). Dalam hal ini, Hou dkk. (2016) menemukan bahwa perkembangan FinTech melemahkan hubungan positif antara tingkat pertumbuhan simpanan dan kapitalisasi bank. Dong dkk. (2020) juga menemukan bahwa FinTech menghambat likuiditas perbankan.

Oleh karena itu, hubungan *indirect* antara FinTech dan ketimpangan pendapatan ini dapat terjadi dengan memanfaatkan teknologi keuangan. FinTech dapat membuka akses ke layanan keuangan bagi individu dan pelaku UMKM yang sebelumnya sulit terhubung dengan lembaga perbankan tradisional. Melalui

platform FinTech, individu dengan tingkat pengeluaran per kapita menengah ke bawah dan pelaku umkm dapat dengan mudah mengakses berbagai produk keuangan, seperti layanan pinjaman, asuransi, investasi, dan pembayaran digital.

Dengan akses ke layanan keuangan yang lebih luas melalui pinjaman FinTech, individu dan pelaku UMKM dapat meningkatkan usaha mereka, memperluas jangkauan pasar, dan mengoptimalkan potensi pendapatan. Misalnya, UMKM dapat menggunakan pinjaman dari FinTech untuk memperluas produksi, meningkatkan kualitas produk, atau berinvestasi dalam teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini dapat membantu mereka untuk bersaing lebih baik di pasar dan meningkatkan pendapatan mereka (Siregar, 2020).

Selain itu, terdapat hubungan timbal balik antara pinjaman FinTech dan ketimpangan pendapatan. Pinjaman FinTech dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui akses keuangan yang lebih luas bagi individu dan pelaku UMKM, sementara sebaliknya, tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi juga dapat mempengaruhi adopsi pinjaman FinTech di suatu daerah (Hodula, 2023). Serta, keberadaan variabel kontrol seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka juga perlu diperhatikan dalam analisis penelitian ini. Kedua variabel kontrol tersebut memiliki keterkaitan dengan ketimpangan pendapatan, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan secara keseluruhan, tetapi jika tidak diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja, ketimpangan pendapatan bisa semakin besar (Jiang, 2021). Sementara itu, tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat memperparah ketimpangan pendapatan, karena hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki pekerjaan dan pendapatan yang stabil (Pi & Zhang, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan melakukan analisis terhadap dampak pinjaman FinTech terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah GMM (*Generalized Method of Moments*), yang digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas yang mungkin muncul dalam analisis tersebut. Lebih dari itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan korelasi antara berbagai variabel ekonomi yang pada kenyataannya memiliki sifat dinamis (Baltagi, 2005).

Dalam konteks dinamis, variabel ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai pada periode yang sama, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai pada periode sebelumnya. Ini tercermin dalam penggunaan *lag* pada variabel dependen, yang pada prinsipnya mencerminkan ketergantungan variabel terhadap kondisi masa lalu. Namun, penggunaan *lag* pada variabel dependen ini juga membawa beberapa tantangan yang tidak sesuai dengan asumsi klasik analisis statistik. Salah satunya adalah timbulnya autokorelasi, di mana ada korelasi antara *lag* variabel dependen dengan variabel independen dan residual *error term*. Akibatnya, penggunaan metode OLS (*Ordinary Least Squares*) saja bisa menyebabkan bias dalam hasil analisis (Nickell, 1981).

Untuk mengatasi tantangan ini, Arellano dan Bond (1991) mengusulkan metode GMM sebagai alternatif yang mampu menangani masalah autokorelasi dan mengontrol endogenitas dalam analisis regresi. Metode GMM ini memberikan pendekatan yang lebih akurat dalam mengestimasi hubungan antara variabel-variabel yang kompleks dan dinamis, seperti yang ada dalam kajian pengaruh pinjaman FinTech terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah "Bagaimana pengaruh serta hubungan pinjaman FinTech terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia baik di seluruh provinsi maupun pada sub kelompok provinsi?"

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh serta hubungan pinjaman FinTech terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian dengan menggunakan data panel tingkat provinsi dapat berkontribusi dalam literatur perkembangan FinTech dan ketimpangan pendapatan, seiring dengan bertambahnya pengetahuan mengenai pengaruh pinjaman FinTech terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tinjauan literatur untuk pengembangan berbagai penelitian berikutnya. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan bukti empiris terkait

perbandingan pengaruh pinjaman FinTech terhadap ketimpangan pendapatan di kelompok provinsi dengan pinjaman FinTech yang tinggi dan rendah, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dan otoritas terkait.

